



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,  
[www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id](http://www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id); E-mail : [ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id](mailto:ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id)

---

SAMBUTAN  
DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
PADA PEMBUKAAN  
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
REKOMENDASI DAN FINALISASI PEMBUATAN PETA BATAS SECARA  
KARTOMETRIK  
DI HOTEL ARYA DUTA JAKARTA  
Jakarta, 2 OKTOBER 2018

---

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,*

*Salam Sejahtera.*

Yang saya hormati :

1. Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau yang mewakili;
2. Bupati Tasikmalaya, Madiun, Nganjuk, Jombang, Polewali Mandar, Majene, Mamasa dan Pinrang atau yang mewakili;
3. Walikota Cirebon atau yang mewakili;
4. Para Pejabat dan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, Kabupaten serta;
5. Para Narasumber, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, peserta rapat dan undangan yang berbahagia.

Untuk mengawali acara ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa menghadiri Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Dan Finalisasi Pembuatan Peta Batas Secara Kartometrik. Rapat koordinasi saat ini merupakan lanjutan dari proses-proses sebelumnya (pengumpulan dan analisa dokumen, pelacakan/survey lapangan serta pertemuan - pertemuan koordinasi sebelumnya), sehingga rapat koordinasi saat ini merupakan proses akhir dalam penyusunan draft Permendagri tentang Batas Daerah.

Pada rapat koordinasi kali ini akan dilakukan pembahasan sebanyak 5 (lima) Segmen yang terdiri dari:

1. Segmen batas di Provinsi Jawa Timur: a) Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang;

2. Segmen batas di Provinsi Sulawesi Barat: a) Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene, b) Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa;
3. Segmen batas antar Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan; a) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan b) Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Segmen batas Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Madiun dan Kota Cirebon

Hadirin dan peserta rapat yang berbahagia,

Beberapa manfaat atau dampak dengan telah selesainya penegasan batas daerah adalah:

1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan kejelasan administrasi pertanahan;
2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada masyarakat dan kejelasan pengelolaan perizinan SDA dan Perkebunan serta perizinan lainnya;
3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah pengaturan tata ruang daerah;
4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih (pemilu, pemilukada).

Dalam rangka mempercepat penegasan batas daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah, dengan target-target tahun sebagai berikut :

No	Tahun	Target Penyelesaian
1	2016	Pulau Kalimantan
2	2017	Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT
3	2018	Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua dan Jawa

### **Hadirin yang berbahagia;**

Memperhatikan pasal 34 Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah, bahwa batas daerah yang telah ditetapkan dengan Permendagri dapat diubah apabila:

- a. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama sama kepada Menteri melalui Gubernur.
- c. Kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri dan;
- d. Penataan daerah

Berkaitan dengan target dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, kami ingin menyampaikan perkembangan penyelesaian batas antar daerah hingga saat ini. Segmen batas antar daerah seluruh Indonesia berjumlah 977 terdiri dari 162 segmen batas provinsi dan 815 segmen batas kabupaten/kota dalam provinsi. Dari total segmen batas tersebut, penyelesaian hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Segmen batas antar Provinsi ada 165 segmen, yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 92 segmen (55,76%), dalam proses penyelesaian sejumlah 58 segmen (35,15%); dan belum dilakukan penegasan sejumlah 15 segmen (09,09%)
2. Segmen batas Kabupaten/Kota ada 812 segmen yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 406 (50,00%), yang masih proses penegasan sejumlah 260 (32,01%), dan yang belum dilakukan penegasan sejumlah 146 (17,98%)

Sehingga dapat disimpulkan dari total 977 segmen batas daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah Permendagri hingga September 2018 sejumlah 498 (50,97%) dan 479 (49,02%) segmen masih dalam proses penyelesaian.

Hadirin dan peserta rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target-target KSP sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang belum terselesaikan (Jawa Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan) agar segera dilakukan percepatan dengan cara mengefektifkan Tim PBD masing-masing untuk survey lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Pusat;
2. Khusus untuk sub segmen batas daerah yang masih diperselisihkan oleh masing-masing daerah yang berbatasan, agar penyelesaiannya mempedomani Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dengan memperhatikan dokumen dan proses-proses fasilitasi yang sudah pernah dilakukan;
3. Untuk segmen batas daerah yang sudah disepakati antar daerah berbatasan, agar di informasikan kepada perangkat daerah masing – masing Kabupaten/Camat/Kelurahan/ Kepala Desa yang berbatasan oleh pemerintah daerah masing – masing, untuk dijadikan acuan peta tematik yang lain (RTRW, Perizinan, dsb)

Demikian hal–hal yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucapkan **Bismillaahirrahmaanirrahiim** Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Dan Finalisasi Pembuatan Peta Batas Secara Kartometrik Tahun 2018 secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam pengabdian diri kita kepada nusa, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih,

Wassalam' mualaikum Wr. Wb.

**Direktur Jenderal  
Bina Administrasi Kewilayahan,  
TTD**

**Eko Subowo**